



PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

RENJA PERUBAHAN

RENCANA KERJA PERUBAHAN

2024



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024 ini dapat diselesaikan.

Ini berisikan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bojonegoro di tahun 2024 dan akan menjadi pedoman bagi seluruh aparatur dalam melaksanakan tugasnya di bidang pengelolaan lingkungan hidup.

Akhirnya kami berharap semoga Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bojonegoro tahun 2024 ini dapat bermanfaat, khususnya bagi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bojonegoro dalam melaksanakan kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bojonegoro di tahun 2024, sehingga diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik.

Bojonegoro, 23 September 2024

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN BOJONEGORO



DANDI SUPRAYITNO, AP, M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19730715 199311 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum.....	2
1.3. Maksud dan Tujuan	7
1.4. Sistematika Penulisan	8
BAB II	12
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA S/D TRIWULAN II TAHUN 2024	12
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja DLH sampai pada Triwulan II Tahun 2024	12
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan	24
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DLH	27
2.4. Review Terhadap RKPD	28
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	48
BAB III	50
TUJUAN SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN	50
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi	50
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Lingkungan Hidup	51
3.3. Program dan Kegiatan.....	51
BAB IV	57
RENCANA PROGRAM DAN PENDANAAN.....	57
4.1. Program Dan Pendanaan	57
BAB V	82
PENUTUP	82

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1. Evaluasi Terhadap Hasil Renja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bojonegoro Sampai dengan Triwulan II Tahun 2024.	14
Tabel 2. 2. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bojonegoro.....	25
Tabel 2. 3. Review Terhadap RKPD Tahun 2024 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bojonegoro.	30
Tabel 2. 4. Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Tahun 2024.	49
 Tabel 3. 1. Perumusan Tujuan dan Sasaran.....	 51
Tabel 3. 2. Rekapitulasi Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Tahun 2024 Perubahan.....	56
 Tabel 4. 1. Pagu Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024. .	 58

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024 merupakan bentuk pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja PD) untuk periode tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) PD, serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024.

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024, disinkronkan dengan prioritas agenda pembangunan Kabupaten Bojonegoro tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam RPD Kabupaten Bojonegoro tahun 2024-2026 dan RKPD Kabupaten Bojonegoro tahun 2024.

Rencana Kerja (Renja) PD merupakan satu dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan PD khususnya dan pembangunan tahunan daerah pada umumnya. Sebagai satu dokumen rencana resmi yang penting, sudah sepatutnya pemerintah daerah, DPRD dan masyarakat memberikan perhatian penting pada kualitas proses penyusunan dokumen Renja PD, dan tentunya diikuti dengan pemantauan, evaluasi, dan review berkala atas implementasinya.

PD merupakan fungsi penting dan sangat fundamental dalam sistem perencanaan daerah karena Renja adalah perencanaan pada unit organisasi terendah dan terkecil di pemerintah daerah yang memberikan masukan utama dan mendasar bagi perencanaan di peringkat yang lebih atas seperti RKPD, Renstra, RPJMD dan bahkan RPJPD.

Renja PD berhubungan langsung dengan pelayanan kepada masyarakat yang merupakan tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kualitas penyusunan Renja PD akan sangat menentukan kualitas pelayanan PD yang diberikan kepada masyarakat penggunaanya.

Dengan demikian, Renja merupakan serangkaian aktifitas yang akan dilaksanakan, dengan tidak mengesampingkan permasalahan yang dihadapi di masa lalu, sehingga melalui Renja ini akan tergambar aktifitas yang akan dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bojonegoro dalam kurun waktu 1 (satu) tahun ke depan.

Renja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bojonegoro tahun 2024 menjadi pedoman bagi pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup tahun 2024, untuk mendukung perwujudan tujuan dan sasaran Dinas Lingkungan Hidup serta menjadi dasar estimasi terhadap penganggaran, yang akan menjadi dasar penyusunan RKA PD tahun 2024 dan selanjutnya menjadi bahan pertimbangan penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bojonegoro disusun berdasarkan:

- 1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
- 3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- 5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah;
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59);
- 11) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- 12) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 13) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024;
- 14) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- 15) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 16) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015;

- 17) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;
- 18) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- 19) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 20) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.84/MENLHK-SETJEN/KUM.1/11/2016 tentang Program Kampung Iklim;
- 21) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.73/MENLHK /SETJEN /KUM.1/ 12/ 2017 tentang pedoman penyelenggaraan dan pelaporan inventarisasi Gas Rumah Kaca Nasional;
- 22) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.69/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/12/2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 89);
- 23) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.52/MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/2019 tentang Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah;
- 24) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.53/MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/2019 tentang Penghargaan Adiwiyata;

- 25) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.23/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 tentang laboratorium lingkungan;
- 26) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup Dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 270);
- 27) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 268);
- 28) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 5 tahun 2021 tentang tata cara penerbitan persetujuan teknis dan surat kelayakan operasional pengendalian pencemaran lingkungan;
- 29) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara Dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 294);
- 30) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 tahun 2021 tentang perencanaan kehutanan perubahan peruntukan Kawasan hutan dan perubahan fungsi Kawasan hutan serta penggunaan Kawasan hutan;
- 31) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengelolaan Limbah Nonbahan Berbahaya Dan Beracun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1214);

- 32) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan;
- 33) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup;
- 34) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 35) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 36) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 37) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024;
- 38) Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 6 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Bojonegoro Tahun 2005-2025;
- 39) Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2016 Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 Pembentukan dan

Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2021 Nomor 8);

- 40) Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Bojonegoro Tahun 2018-2023;
- 41) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024;
- 42) Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 87 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bojonegoro;
- 43) Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 10.A Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah 2024-2026;
- 44) Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 15 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024-2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024 ini adalah sebagai berikut :

- 1) Sebagai penjabaran tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup;
- 2) Menyelaraskan tujuan, sasaran dan agenda Dinas Lingkungan Hidup;
- 3) Memberikan gambaran secara lengkap program/kegiatan yang akan dilaksanakan di tahun 2024;
- 4) Menjaga kesinambungan pelaksanaan program/kegiatan Dinas Lingkungan Hidup pada tahun berjalan dengan tahun sebelumnya;
- 5) Memberikan masukan utama bagi penyusunan RKA PD, KUA PPAS, dan RAPBD.

Sedangkan tujuan penyusunan Renja Dinas Lingkungan Hidup tahun 2024 adalah:

- 1) Sebagai pedoman dalam melaksanakan program/kegiatan/sub kegiatan, sehingga sesuai dengan rencana yang telah disusun;

- 2) Memudahkan pengorganisasian, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan yang akan dilaksanakan;
- 3) Dapat dijadikan sebagai tolak ukur untuk mengetahui keberhasilan dan atau kegagalan Dinas Lingkungan Hidup dalam melaksanakan program/kegiatan;
- 4) Mensinkronkan dan mensinergikan program/kegiatan Dinas Lingkungan Hidup dengan target dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam dokumen RPJMD Kabupaten Bojonegoro.

1.4. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bojonegoro adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Rencana Kerja Perubahan agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1 Latar Belakang

Berisi pengertian ringkas tentang Rancangan Kerja Perubahan, proses penyusunan Rancangan Renja-PD, keterkaitan antara Rancangan Renja-PD dengan dokumen RKPD, Renstra PD, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan R-APBD.

1.2 Landasan Hukum

Berisi penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan Ketentuan Peraturan Lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Berisi penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Rancangan Renja-PD

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Rancangan RenjaPD, serta susunan garis besar isi dokumen.

Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun lalu dan Capaian Renstra Berisi kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja-PD tahun lalu (Tahun 2023) dan perkiraan capaian tahun berjalan (Tahun 2024), mengacu pada APBD Tahun 2024. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra PD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja-PD tahun-tahun sebelumnya.
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD
Berisi kajian terhadap capaian kinerja pelayanan PD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD
Berisi uraian mengenai:
 - 1) Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan PD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan PD;
 - 2) Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi PD;
 - 3) Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah, terhadap capaian program nasional/internasional;
 - 4) Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan PD;
 - 5) Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.
- 2.4 Review terhadap RKPD

Berisi uraian mengenai:

- 1) Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
- 2) Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
- 3) Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarnya berbeda

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Berisi hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan PD, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari PD Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi PD Provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang Kabupaten/Kota.

Bab III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Berisi telaahan terhadap kebijakan Nasional sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan Nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi PD.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD

Berisi perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra PD.

3.3 Program dan Kegiatan

Berisi perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra PD.

Bab IV Rencana Program dan Pendanaan

Berisi tentang penjelasan atas adanya ketidaksesuaian rumusan program dan kegiatan dengan RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

Bab V Penutup

Berisi uraian penutup, berupa:

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
- b. Kaidah-kaidah pelaksanaan.
- c. Rencana tindak lanjut.

Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama Perangkat Daerah dan nama dan tanda tangan kepala Perangkat Daerah, serta cap pemerintah daerah yang bersangkutan.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA S/D TRIWULAN II TAHUN 2024

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja DLH sampai pada Triwulan II Tahun 2024

Sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen.

Perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya, oleh karena itu Perubahan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024 juga harus dilakukan evaluasi. Evaluasi terhadap Perubahan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024 meliputi 3 (tiga) hal yaitu:

1. Kebijakan perencanaan program dan kegiatan;
2. Pelaksanaan rencana program dan Kegiatan;
3. Hasil rencana program dan kegiatan.

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024, memperhatikan beberapa unsur pokok sebagai berikut:

- a. Masalah - masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya;
- b. Tujuan yang dikehendaki;
- c. Sasaran - sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya;
- d. Kebijakan - kebijakan untuk melaksanakannya serta seksi pelaksana.

Evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Pencapaian Perencanaan Strategis (Renstra) Organisasi Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup sampai dengan triwulan II Tahun 2024 (tahun berjalan).

Renja pada tahun 2024 sudah sampai pada triwulan ke II. Dalam pelaksanaannya ada beberapa factor yang dapat mempengaruhi capaian target yang direncanakan pada tiap triwulan.

1. Faktor Pendorong
 - Koordinasi dan kerjasama antar instansi berjalan dengan baik

- Tersedianya anggaran yang mencukupi
2. Faktor Penghambat
 - Kurangnya kesadaran masyarakat tentang kepedulian lingkungan
 - Terbatasnya sarana prasarana pengelolaan lingkungan
 3. Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya
 - Meningkatkan kegiatan sosialisasi kepedulian lingkungan kepada Masyarakat
 - Memaksimalkan pengguna sarana prasarana yang tersedia
 4. Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD PD Tahun Berikutnya
 - Menggalakan program-program kepedulian lingkungan yang langsung melibatkan Masyarakat
 - Mengusulkan penambahan sarana prasarana pengelolaan lingkungan

Adapun hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Lingkungan Hidup tahun 2024 sampai dengan triwulan II sebagai berikut:

Tabel 2. 1. Evaluasi Terhadap Hasil Renja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bojonegoro Sampai dengan Triwulan II Tahun 2024.

No	Tujuan / Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang / Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan Indikator	Target RENSTRA sampai pada Tahun 2026 (Akhir Periode RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA s.d RENJA Tahun Lalu (n-2)	Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun berjalan yg dievaluasi (2024)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran RENJA Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Anggaran RENJA Tahun 2024 (%)		Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran RENSTRA Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RENSTRA Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						7	8			9	10	11	12										13	
						1	2	3	4	5	6	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.
				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																		DLH		
				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP																		DLH		
	Tujuan : Meningkatkan kualitas lingkungan hidup sebagai pondasi pembangunan berkelanjutan																					DLH		
				Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)		68.56			70.14															
	Sasaran : Cakupan pengelolaan sampah																					DLH		
				Persentase pengelolaan sampah	%	100			100															
	Sasaran : Ketaatan penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan oleh pemerintah kabupaten																					DLH		
				Persentase ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan oleh pemerintah kabupaten	%	95.83			95.45															
	Sasaran : Terkendalinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup																					DLH		
				Indeks Kualitas Air (IKA)		55.73			58.5															
				Indeks Kualitas Lahan (IKL)		57.07			58.59															
				Indeks Kualitas Udara (IKU)		86.7			87.2															
1	2	11	02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP			1,444,133,286		733,572,380		29,823,150		61,699,675				91,522,825		12.48 %		91,522,825		6.34 %	DLH
				Persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup yang tersedia	%	100			100		16.66					16.66		16.66 %		16.66		16.66 %		
	2	11	02	2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota		1,144,133,286		504,469,780		26,751,950		61,699,675				88,451,625		17.53 %		88,451,625		7.73 %	DLH
				Jumlah dokumen RPPLH yang disusun	Dokumen	12			3			1				1		33.33 %		1		8.33 %		
	2	11	02	2.01	0002 Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota		1,144,133,286		504,469,780		26,751,950		61,699,675				88,451,625		17.53 %		88,451,625		7.73 %	DLH
				Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	Dokumen	12			3			1				1		33.33 %		1		8.33 %		
	2	11	02	2.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota		300,000,000		229,102,600		3,071,200						3,071,200		1.34 %		3,071,200		1.02 %	DLH
				Jumlah dokumen KLHS yang disusun	Dokumen	4			1															
	2	11	02	2.02	0002 Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD		300,000,000		229,102,600		3,071,200						3,071,200		1.34 %		3,071,200		1.02 %	DLH
				Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	Dokumen	4			1															
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM																	16.66 %	12.48 %			4.17 %	6.34 %	DLH	
PREDIKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM																	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	DLH	
FAKTOR PENDORONG KEBERHASILAN KINERJA PROGRAM						1. Kerjasama yang baik dengan instansi terkait dalam pemenuhan data																		
FAKTOR PENGHAMBAT PENCAPAIAN KINERJA PROGRAM						1. Menyesuaikan jadwal validasi dari DLH Provinsi																		
TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN DALAM TRIWULAN BERIKUTNYA						1. Melakukan validasi dokumen KLHS RPJMD																		
TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN DALAM RKPD PD TAHUN BERIKUTNYA						1. Melakukan koordinasi dan konsultasi lebih lanjut ke Provinsi/KLHK																		

RENJA PERUBAHAN 2024

No	Tujuan / Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan Indikator	Target RENSTRA sampai pada Tahun 2026 (Akhir Periode RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA s.d RENJA Tahun Lalu (n-2)	Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun berjalan yg dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran RENJA Tahun 2024	Tingkat Capaian Kinerja & Anggaran RENJA Tahun 2024 (%)	Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran RENSTRA Tahun 2024	Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RENSTRA Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
						7	Rp.		K	Rp.	K	Rp.	I		II		III					IV			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
													10	11	12	13	14	15				16	17							
1	2	3	4	5	6	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	18				
2		2 11 03		PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP			4,194,999,699				1,741,060,416		63,194,464		67,548,575						130,743,039		7.51 %		130,743,039		3.12 %	DLH		
				Persentase luasan lahan yang direhabilitasi	%	2.1				1.53																				
				Persentase titik pantau yang memenuhi baku mutu kualitas air dan udara	%	13				12																				
		2 11 03 2.01		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota			3,571,447,042				1,552,316,616		59,322,644		67,548,575							126,871,219		8.17 %		126,871,219		3.55 %	DLH	
				Jumlah titik observasi atau pengujian lingkungan hidup	Titik	30				25		24							24		96.00 %		24		80.00 %					
		2 11 03 2.01 0001		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut			914,262,297			350,511,500		2,654,700		6,968,000					9,622,700		2.75 %		9,622,700		1.05 %	DLH				
				Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Dokumen	374				93		31						31		33.33 %		31		8.29 %						
		2 11 03 2.01 0002		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan iklim			617,162,886			396,369,500		1,491,900		5,965,900					7,457,800		1.88 %		7,457,800		1.21 %	DLH				
				Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	Dokumen	4				1																				
		2 11 03 2.01 0015		Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota			2,040,021,859			805,435,616		55,176,044		54,614,675					109,790,719		13.63 %		109,790,719		5.38 %	DLH				
				Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	Dokumen	48				12		3		3				6		50.00 %		6		12.50 %						
		2 11 03 2.02		Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota			71,847,853			21,706,300		1,933,320							1,933,320		8.91 %		1,933,320		2.69 %	DLH				
				Jumlah kegiatan usaha yang melakukan penanggulangan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan yang memenuhi standar	Kegiatan/Usaha	30				30		5						5		16.67 %		5		16.67 %						
		2 11 03 2.02 0001		Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat			71,847,853			21,706,300		1,933,320							1,933,320		8.91 %		1,933,320		2.69 %	DLH				
				Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	Laporan	8				2		1						1		50.00 %		1		12.50 %						
		2 11 03 2.03		Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota			551,704,804			167,037,500		1,938,500							1,938,500		1.16 %		1,938,500		0.35 %	DLH				
				Jumlah luasan lokasi sumber air dan lahan kritis yang tertangani	Ha	0.88				0.64																				
		2 11 03 2.03 0013		Koordinasi dan Sinkronisasi rehabilitasi			551,704,804			167,037,500		1,938,500							1,938,500		1.16 %		1,938,500		0.35 %	DLH				
				Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan	Kegiatan	4				1																				
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM																			30.75 %	7.51 %			16.24 %	3.12 %	DLH					
PREDIKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM																			Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	DLH					
FAKTOR PENDORONG KEBERHASILAN KINERJA PROGRAM						1. Kerjasama yang baik dengan pihak jasa uji kualitas lingkungan																								
FAKTOR PENGHAMBAT PENCAPAIAN KINERJA PROGRAM						1. DLH belum bisa melakukan uji kualitas lingkungan secara mandiri																								
TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN DALAM TRIWULAN BERIKUTNYA						1. Mempersiapkan kelengkapan akreditasi laboratorium																								

RENJA PERUBAHAN 2024

No	Tujuan / Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan Indikator	Target RENSTRA sampai pada Tahun 2026 (Akhir Periode RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA s.d RENJA Tahun Lalu (n-2)	Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun berjalan yg dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran RENJA Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Anggaran RENJA Tahun 2024 (%)		Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran RENSTRA Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RENSTRA Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						7	Rp.		8	9	10	11		12	13	14	15	16	17					
												K	Rp.						K	Rp.	K	Rp.		K
TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN DALAM RKPD PD TAHUN BERIKUTNYA						1. Mengusahakan percepatan akreditasi laboratorium																		
3		2 11 04		PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)		37,823,750,000			12,801,650,000		1,731,240,107		4,095,533,227				5,826,773,334		45.52 %		5,826,773,334		15.41 %	DLH
				Persentase luas RTH yang berfungsi baik	%	100			100		100		100				100		100 %		100		100 %	
		2 11 04	2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota		37,823,750,000			12,801,650,000		1,731,240,107		4,095,533,227				5,826,773,334		45.52 %		5,826,773,334		15.41 %	DLH
				Luas RTH yang berfungsi baik	Ha	142.66			142.66		142.66		142.66				142.66		100 %		142.66		100 %	
		2 11 04	2.01 0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)		37,823,750,000			12,801,650,000		1,731,240,107		4,095,533,227				5,826,773,334		45.52 %		5,826,773,334		15.41 %	DLH
				Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	Ha	142.66			142.66		142.66		142.66				142.66		100 %		142.66		100 %	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM																		100 %	45.52 %			100 %	15.41 %	DLH
PREDIKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM																		Sangat Tinggi	Sangat Rendah			Sangat Tinggi	Sangat Rendah	DLH
FAKTOR PENDORONG KEBERHASILAN KINERJA PROGRAM						1. Kesadaran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan yang meningkat																		
FAKTOR PENGHAMBAT PENCAPAIAN KINERJA PROGRAM						1. Pelaksanaan tidak sesuai jadwal dikarenakan perencanaan belum selesai masih proses																		
TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN DALAM TRIWULAN BERIKUTNYA						1. Segera melakukan percepatan menyesuaikan jadwal																		
TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN DALAM RKPD PD TAHUN BERIKUTNYA						1. Lebih teliti dalam penjadwalan kegiatan																		
4		2 11 05		PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)		111,785,200			38,418,400		640,000		8,729,423				9,369,423		24.39 %		9,369,423		8.38 %	DLH
				Persentase persetujuan yang sudah memenuhi rincian teknis limbah B3	%	100			100		10		60				60		60.00 %		60		60.00 %	
		2 11 05	2.01	Penyimpanan sementara Limbah B3		111,785,200			38,418,400		640,000		8,729,423				9,369,423		24.39 %		9,369,423		8.38 %	DLH
				Jumlah persetujuan lingkungan yang memuat rincian teknis penyimpanan sementara limbah B3	Dokumen	40			10		1		5				6		60.00 %		6		15.00 %	
		2 11 05	2.01 0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik		4,285,200			20,249,200														DLH	
				Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Dokumen	40			10		1		5				6		60.00 %		6		15.00 %	
		2 11 05	2.01 0002	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3		107,500,000			18,169,200		640,000		8,729,423				9,369,423		51.57 %		9,369,423		8.72 %	DLH
				Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	Laporan	40			10		1		5				6		60.00 %		6		15.00 %	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM																		60.00 %	24.39 %			15.00 %	8.38 %	DLH
PREDIKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM																		Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	DLH
FAKTOR PENDORONG KEBERHASILAN KINERJA PROGRAM						1. Proses perizinan sudah terintegrasi secara elektronik																		
FAKTOR PENGHAMBAT PENCAPAIAN KINERJA PROGRAM																								
TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN DALAM TRIWULAN BERIKUTNYA																								
TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN DALAM RKPD PD TAHUN BERIKUTNYA																								
5		2 11 06		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)		664,705,296			50,591,987		2,860,000		10,635,000				13,495,000		26.67 %		13,495,000		2.03 %	DLH

RENJA PERUBAHAN 2024

No	Tujuan / Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan Indikator	Target RENSTRA sampai pada Tahun 2026 (Akhir Periode RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RENTRA s.d RENJA Tahun Lalu (n- 2)	Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun berjalan yg dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran RENJA Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Anggaran RENJA Tahun 2024 (%)		Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran RENTRA Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RENTRA Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						7	8		9	I		II		III		IV		14		15		16		17			
										K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	
1	2	3			4	5	6	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	18	
						Persentase pembinaan dan pengawasan usaha dan/atau kegiatan yang terlaksana	%	100			100		20.45		53.94				53.94		53.94		53.94		53.94		
	2	11	06	2.01		Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		664,705,296			50,591,987		2,860,000		10,635,000				13,495,000		26.67	%		13,495,000		2.03	DLH
						Jumlah dokumen pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungannya diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten	Dokumen	180			44		9		9				18		40.91	%		18		10.00	
	2	11	06	2.01	0001	Facilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH		90,000,000			21,691,187															DLH	
						Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	Dokumen	15			5		1		3				4		80.00	%		4		26.67	
	2	11	06	2.01	0005	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup		574,705,296			28,900,800		2,860,000		10,635,000				13,495,000		46.69	%		13,495,000		2.35	DLH
						Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	Badan Usaha	180			44		9		9				18		40.91	%		18		10.00	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM																				53.94	26.67			15.56	2.03	DLH	
PREDIKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM																				Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	DLH	
FAKTOR PENDORONG KEBERHASILAN KINERJA PROGRAM							1. Koordinasi yang baik dengan pelaku usaha dan atau kegiatan yang menjadi objek pengawasan																				
FAKTOR PENGHAMBAT PENCAPAIAN KINERJA PROGRAM																											
TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN DALAM TRIWULAN BERIKUTNYA																											
TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN DALAM RKPD PD TAHUN BERIKUTNYA																											
6		2	11	08		PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT		1,123,366,005			593,810,782		177,689,900		19,100,500				196,790,400		33.14	%		196,790,400		17.52	DLH
						Persentase kelompok masyarakat yang telah memiliki rencana aksi yang aktif melakukan gerakan peduli lingkungan hidup	%	76			68																
		2	11	08	2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		1,123,366,005			593,810,782		177,689,900		19,100,500				196,790,400		33.14	%		196,790,400		17.52	DLH
						Jumlah kelompok masyarakat yang telah memiliki rencana aksi yang mendapatkan pendampingan gerakan peduli lingkungan	Lembaga	70			17																
		2	11	08	2.01	0002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup		1,123,366,005			593,810,782		177,689,900		19,100,500			196,790,400		33.14	%		196,790,400		17.52	DLH
						Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	Dokumen	104			25		10		15			25		100	%		25		24.04		
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM																				50.00	33.14			12.02	17.52	DLH	
PREDIKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM																				Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	DLH	
FAKTOR PENDORONG KEBERHASILAN KINERJA PROGRAM							1. Koordinasi dan kerjasama yang baik dengan lembaga peduli lingkungan																				
FAKTOR PENGHAMBAT PENCAPAIAN KINERJA PROGRAM							1. Pemberian penghargaan menunggu pengumuman dari DLH provinsi dan/ LKHK																				
TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN DALAM TRIWULAN BERIKUTNYA							1. Berkoordinasi dengan DLH provinsi dan/ KLHK																				

RENJA PERUBAHAN 2024

No	Tujuan / Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan Indikator	Target RENSTRA sampai pada Tahun 2026 (Akhir Periode RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA s.d RENJA Tahun Lalu (n- 2)	Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun berjalan yg dievaluasi (2024)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran RENJA Tahun 2024	Tingkat Capaian Kinerja & Anggaran RENJA Tahun 2024 (%)	Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran RENSTRA Tahun 2024	Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RENSTRA Tahun 2024 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab								
						7	8			9	10	11	12						13	14	15	16	17			
						1	2	3	4	5	6	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN DALAM RKPD PD TAHUN BERIKUTNYA						1. Meningkatkan koordinasi dengan DLH provinsi dan/ KLHK																				
7		2 11 09		PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT			485,047,649			87,165,700			851,500		13,590,000				14,441,500		16.57 %		14,441,500		2.98 %	DLH
				Persentase masyarakat/ lembaga masyarakat/ dunia pendidikan/ filantropi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkunagn hidup yang menerima penghargaan	%	75			70																	
		2 11 09	2.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			485,047,649			87,165,700			851,500		13,590,000				14,441,500		16.57 %		14,441,500		2.98 %	DLH
				Jumlah penghargaan lingkungan hidup tingkat daerah Kabupaten/ Kota yang diberikan	Entitas	114			28																	
		2 11 09	2.01	0001 Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup			485,047,649			87,165,700			851,500		13,590,000				14,441,500		16.57 %		14,441,500		2.98 %	DLH
				Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	Entitas	170			40			20			20		50.00 %		20		11.76 %					
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM															25.00 %	16.57 %			5.88 %	2.98 %	DLH					
PREDIKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM															Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	DLH					
FAKTOR PENDORONG KEBERHASILAN KINERJA PROGRAM						1. Koordinasi dengan tim penilai Calon Sekolah Adiwiyata Kabupaten telah mencapai tahapan verifikasi lapangan																				
FAKTOR PENGHAMBAT PENCAPAIAN KINERJA PROGRAM						1. Adanya kegiatan yang berjalan bersamaan																				
TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN DALAM TRIWULAN BERIKUTNYA						1. Melakukan program sesuai time schedule yaitu pengumuman peraih penghargaan Sekolah Adiwiyata Kabupaten. 2. Program Adibwana akan dilaksanakan setelah koordinasi dengan tim ahli																				
TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN DALAM RKPD PD TAHUN BERIKUTNYA						1. Meningkatkan koordinasi dengan DLH provinsi dan/ KLHK																				
8		2 11 10		PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP			169,609,248			22,940,900			1,280,000		5,781,300				7,061,300		30.78 %		7,061,300		4.16 %	DLH
				Persentase Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang tertangani	%	100			100	18.75	31.25			31.25		31.25 %		31.25		31.25 %						
		2 11 10	2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota			169,609,248			22,940,900			1,280,000		5,781,300				7,061,300		30.78 %		7,061,300		4.16 %	DLH
				Jumlah Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang terselesaikan	Dokumen	60			16	3	2			5		31.25 %		5		8.33 %						
		2 11 10	2.01	0004 Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota			110,704,848			3,557,700			1,108,900		1,108,900		31.17 %		1,108,900		1.00 %	DLH				
				Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani	Pengaduan	60			16	3	2			5		31.25 %		5		8.33 %						
		2 11 10	2.01	0005 Penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota			58,904,400			19,383,200			1,280,000		4,672,400			5,952,400		30.71 %		5,952,400		10.11 %	DLH	
				Jumlah sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	Perkara	60			16	3	2			5		31.25 %		5		8.33 %						
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM															31.25 %	30.78 %			8.33 %	4.16 %	DLH					
PREDIKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM															Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	DLH					
FAKTOR PENDORONG KEBERHASILAN KINERJA PROGRAM						1. Tersedianya sarana pengaduan secara elektronik																				

RENJA PERUBAHAN 2024

No	Tujuan / Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan Indikator	Target RENSTRA sampai pada Tahun 2026 (Akhir Periode RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA s.d RENJA Tahun Lalu (n-2)	Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun berjalan yg dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran RENJA Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Anggaran RENJA Tahun 2024 (%)		Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran RENSTRA Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RENSTRA Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
											I		II		III		IV													
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18													
1	2	3	4	5	6	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	18				
FAKTOR PENGHAMBAT PENCAPAIAN KINERJA PROGRAM																														
TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN DALAM TRIWULAN BERIKUTNYA																														
TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN DALAM RKPD PD TAHUN BERIKUTNYA																														
9		2	11	11		PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN			41,631,876,136				10,130,590,912		226,066,150		954,844,650						1,180,910,800		11.66		1,180,910,800		2.84	DLH
							Persentase volume sampah yang dikelola	%	100			100	27.18		40.33				40.33		40.33		40.33		40.33		40.33			
			2	11	11	2.01	Pengelolaan Sampah		41,631,876,136				10,130,590,912		226,066,150		954,844,650					1,180,910,800		11.66		1,180,910,800		2.84	DLH	
							Volume sampah yang dikelola per tahun	Ton	23484.13			22902.23	6224.81		5776.51				5776.51		25.22		5776.51		24.60					
			2	11	11	2.01	0004	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan		669,340,000			194,989,200		2,150,000		14,674,800				16,824,800		8.63		16,824,800		2.51	DLH		
							Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	Kelompok	182			176	174		174				174		98.86		174		95.60					
			2	11	11	2.01	0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan		105,000,000			41,022,000															DLH		
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada	Dokumen	8			2																		
			2	11	11	2.01	0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota		22,457,656,136			4,578,523,712															DLH		
							Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	Unit	610			200																		
			2	11	11	2.01	0008	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota		345,000,000			115,000,000															DLH		
							Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan	Dokumen	4			1																		
			2	11	11	2.01	0015	Penanganan sampah melalui pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan sampah		16,164,460,000			4,625,765,000		223,916,150		821,524,850			1,045,441,000		22.60		1,045,441,000		6.47	DLH			
							Jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik	Unit	260			64	64		64				64		100		64		24.62					
			2	11	11	2.01	0019	Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah		296,600,000			84,351,000				19,520,000			19,520,000		23.14		19,520,000		6.58	DLH			
							Jumlah sampah yang terdaur ulang	Ton	32408.1			951.66	214.44		222.1				436.54		45.87		436.54		1.35					
			2	11	11	2.01	0020	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional		1,593,820,000			490,940,000				99,125,000			99,125,000		20.19		99,125,000		6.22	DLH			
							Jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	Ton	15029.84			21950.57	6010.37		5554.41				11564.78		52.69		11564.78		76.95					
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM																					40.33	11.66			27.89	2.84	DLH			

RENJA PERUBAHAN 2024

No	Tujuan / Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang / Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan Indikator	Target RENSTRA sampai pada Tahun 2026 (Akhir Periode RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA s.d RENJA Tahun Lalu (n-2)	Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun berjalan yg dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran RENJA Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Anggaran RENJA Tahun 2024 (%)		Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran RENSTRA Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RENSTRA Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab																
						7	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		III		IV	14		15		16			17															
												K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	18									
PREDIKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM																					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	DLH
FAKTOR PENDORONG KEBERHASILAN KINERJA PROGRAM					1. Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah																																				
FAKTOR PENGHAMBAT PENCAPAIAN KINERJA PROGRAM					1. Proses pengadaan menunggu yang sesuai dengan spesifikasi																																				
TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN DALAM TRIWULAN BERIKUTNYA					1. Segera melakukan percepatan menyesuaikan jadwal																																				
TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN DALAM RKPD PD TAHUN BERIKUTNYA					1. Lebih teliti dalam penjadwalan kegiatan																																				
						NON URUSAN																		DLH																	
						URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX																		DLH																	
Sasaran : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Pelayanan Perangkat Daerah																																							DLH		
10		X	XX	01																																					
		X	XX	01	2.01																																				
		X	XX	01	2.01	0001																																			
		X	XX	01	2.01	0002																																			
		X	XX	01	2.01	0003																																			
		X	XX	01	2.01	0004																																			
		X	XX	01	2.01	0005																																			
		X	XX	01	2.01	0006																																			
		X	XX	01	2.01	0007																																			

RENJA PERUBAHAN 2024

No	Tujuan / Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan Indikator	Target RENSTRA sampai pada Tahun 2026 (Akhir Periode RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA s.d RENJA Tahun Lalu (n-2)	Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun berjalan yg dievaluasi (2024)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran RENJA Tahun 2024	Tingkat Capaian Kinerja & Anggaran RENJA Tahun 2024 (%)		Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran RENSTRA Tahun 2024	Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RENSTRA Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						7	8	9		10	11		12		13	14		15			16	17	
											K	Rp.						K	Rp.			K	Rp.
1	2	3	4	5	6	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	18	
	X	XX	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		43,918,866,104			19,374,865,451	2,757,795,617		5,067,923,801			7,825,719,418	40.39 %		7,825,719,418	17.82 %	DLH		
					Jumlah laporan keuangan yang disusun	Laporan	4		1														
	X	XX	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	42,527,605,758			18,988,519,151	2,671,487,317		4,994,533,801			7,666,021,118	40.37 %		7,666,021,118	18.03 %	DLH		
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	528		132	129		128			128	96.97 %		128	24.24 %				
	X	XX	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1,341,200,346			371,216,200	76,960,000		73,390,000			150,350,000	40.50 %		150,350,000	11.21 %	DLH		
					Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	48		12	3		3			6	50.00 %		6	12.50 %				
	X	XX	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	50,060,000			15,130,100	9,348,300				9,348,300	61.79 %		9,348,300	18.67 %	DLH			
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	48		12	3		3			6	50.00 %		6	12.50 %				
	X	XX	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		133,393,000			774,877,700											DLH		
					Jumlah layanan administrasi kepegawaian yang tercukupi	Layanan	3		1														
	X	XX	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	133,393,000			774,877,700											DLH		
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	6		2														
	X	XX	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		1,461,988,100			437,062,682	18,048,100		186,659,787			204,707,887	46.84 %		204,707,887	14.00 %	DLH		
					Jumlah layanan administrasi umum yang tercukupi	Layanan	27		7	3					3	42.86 %		3	11.11 %				
	X	XX	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	23,649,000			7,178,000			7,178,000			7,178,000	100 %		7,178,000	30.35 %	DLH		
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	20		5			5			5	100 %		5	25.00 %				
	X	XX	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	552,118,400			118,832,882	6,790,400		97,214,000			104,004,400	87.52 %		104,004,400	18.84 %	DLH		
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	19		4	1		2			3	75.00 %		3	15.79 %				
	X	XX	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	260,366,700			96,294,100			58,004,500			58,004,500	60.24 %		58,004,500	22.28 %	DLH		
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	10		2			1			1	50.00 %		1	10.00 %				
	X	XX	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	157,920,000			76,513,100	1,886,000		1,435,400			3,321,400	4.34 %		3,321,400	2.10 %	DLH		
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	8		2	1					1	50.00 %		1	12.50 %				
	X	XX	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	59,897,000			17,655,600											DLH		
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	21		6														
	X	XX	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	19,860,000			4,320,000			1,120,000			1,120,000	25.93 %		1,120,000	5.64 %	DLH		
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	36		12	1		4			5	41.67 %		5	13.89 %				
	X	XX	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	388,177,000			116,269,000	9,371,700		21,707,887			31,079,587	26.73 %		31,079,587	8.01 %	DLH		
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	225		55	2		11			13	23.64 %		13	5.78 %				
	X	XX	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1,196,199,440			465,598,678	76,536,483		89,419,215			165,955,698	35.64 %		165,955,698	13.87 %	DLH		
					Jumlah jenis jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan	Jenis	14		3	3		3			3	100 %		3	21.43 %				

RENJA PERUBAHAN 2024

No	Tujuan / Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan Indikator	Target RENSTRA sampai pada Tahun 2026 (Akhir Periode RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA s.d RENJA Tahun Lalu (n-2)	Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun berjalan yg dievaluasi (2024)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran RENJA Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Anggaran RENJA Tahun 2024 (%)		Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran RENSTRA Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RENSTRA Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						7				8	9		10		11		12	13	14		15		16		17		
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K
		X XX 01 2.08 0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			618,099,200				235,654,230		48,844,743		38,189,250					87,033,993		36.93 %		87,033,993		14.08 %	DLH
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	48			12		3		3					6		50.00 %		6		12.50 %			
		X XX 01 2.08 0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			578,100,240				229,944,448		27,691,740		51,229,965					78,921,705		34.32 %		78,921,705		13.65 %	DLH
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	48			12		3		3					6		50.00 %		6		12.50 %			
		X XX 01 2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			724,060,795				677,645,500		15,139,600		168,690,995					183,830,595		27.13 %		183,830,595		25.39 %	DLH
				Jumlah jenis pemeliharaan BMD penunjang urusan pemerintahan daerah	Jenis	16			4		2		1					3		75.00 %		3		18.75 %			
		X XX 01 2.09 0002		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			85,020,795				480,848,300		14,800,600		151,340,850					166,141,450		34.55 %		166,141,450		195.41 %	DLH
				Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	121			29		1		13					14		48.28 %		14		11.57 %			
		X XX 01 2.09 0006		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			89,370,000				56,430,000		339,000		1,400,000					1,739,000		3.08 %		1,739,000		1.95 %	DLH
				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	144			35		1		4					5		14.29 %		5		3.47 %			
		X XX 01 2.09 0009		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			549,670,000				140,367,200				15,950,145					15,950,145		11.36 %		15,950,145		2.90 %	DLH
				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1			1																		
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM																				47.30 %	38.54 %			11.35 %	17.64 %	DLH	
PREDIKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM																				Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	DLH	
FAKTOR PENDORONG KEBERHASILAN KINERJA PROGRAM					1. Koordinasi dan kerjasama internal yang baik																						
FAKTOR PENGHAMBAT PENCAPAIAN KINERJA PROGRAM																											
TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN DALAM TRIWULAN BERIKUTNYA																											
TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN DALAM RKPD PD TAHUN BERIKUTNYA																											
JUMLAH TOTAL						135,200,001,958	0	47,968,071,890	5,110,451,671	10,750,506,148	0	0	15,860,957,819			15,860,957,819				21.64 %	11.73 %						
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM																				45.52 %	33.07 %			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM																				Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah		

Adanya perubahan kebijakan dan peraturan perundang-undangan tentang penatausahaan keuangan dan anggaran berdampak sangat signifikan terhadap pelaksanaan kegiatan yang menyebabkan penyerapan anggaran tidak sesuai dengan rencana penyerapan anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Beberapa kendala ini dapat di minimalisir dengan memaksimalkan pelaksanaan kegiatan yang tidak berdampak langsung dengan perjanjian kerjasama atau kegiatan rutin yang telah sesuai dengan jadwal penyerapan pada Rencana Anggaran Kas (RAK).

Dari data sebagaimana Tabel 2.1 tersebut di atas, evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2024 dan Perkiraan Capaian Target Renstra Tahun 2024-2026 samapai dengan triwulan II Tahun 2024 Dinas Lingkungan Hidup sebagai berikut:

1. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2024 sampai dengan triwulan II Tahun 2024 dapat disimpulkan sebagai berikut:
 - a. Dalam rangka pencapaian target yang ditetapkan telah dilaksanakan 10 (sepuluh) program dengan 10 (sepuluh) indikator kinerja program, dan 18 (delapan belas) kegiatan dengan 18 (delapan belas) indikator kegiatan, dan 46 (empat puluh enam) sub kegiatan dengan 46 (empat puluh enam) indikator sub kegiatan.
 - b. Dari 10 (sepuluh) indikator kinerja program terdapat 1 (satu) indikator yang telah tercapai, sedangkan 9 (sembilan) indikator masih dalam proses pencapaian target.
 - c. Dari 18 (delapan belas) indikator kinerja kegiatan, 2 (dua) kegiatan telah memenuhi target, sedangkan 16 (enam belas) masih dalam proses pencapaian target.
2. Perkiraan capaian target renstra tahun 2024-2026 sampai dengan triwulan dua tahun 2024 sebagai berikut:
 - a. Dalam rangka pencapaian target yang ditetapkan telah dilaksanakan 10 (sepuluh) program dengan 10 (sepuluh) indikator kinerja program, dan 18 (delapan belas) kegiatan dengan 18 (delapan belas) indikator kegiatan, 46 (empat puluh enam) sub kegiatan dengan 46 (empat puluh enam) indikator sub kegiatan.

- b. Dari 10 (sepuluh) indikator kinerja program terdapat 1 (satu) indikator yang telah tercapai, sedangkan 9 (sembilan) indikator masih dalam proses pencapaian target.
- c. Dari 18 (delapan belas) indikator kinerja kegiatan, 2 (dua) kegiatan telah memenuhi target, sedangkan 16 (enam belas) masih dalam proses pencapaian target.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan

Pada bagian ini berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Dinas Lingkungan Hidup berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008.

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bojonegoro dalam melaksanakan fungsinya mempunyai tugas membantu bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang lingkungan hidup dan tugas pembantuan, terus berupaya untuk meningkatkan kinerjanya dalam rangka mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan sesuai yang diamanatkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Jenis indikator yang dikaji disesuaikan dengan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan bidang lingkungan hidup. Berikut ini disajikan tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 2. 2. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bojonegoro.

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah			Realisasi Capaian Tahun 2023	Proyeksi Tahun 2024	Catatan Analisis
				Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026			
1	2	3	4	5	6	7			12
1	Presentase Kualitas Air di titik pantau kewenangan kabupaten (Kategori Minimal Sedang)	-	-	30%	35%	40%	-	30%	-
2	Capain Kualitas Udara diwilayah Kabupaten yang meliputi Perkantoran, Transportasi, Perumahan dan Industri	-	-	86,6	86,65	86,7	87,18	87,20	Lokasi pengujian kualitas udara memenuhi target
3	Kualitas Tutupan Lahan berdasarkan Luas Ruang Terbuka Hijau di wilayah Kabupaten	-	-	57,07	57,07	57,07	58,59	58,59	Nilai Kualitas Tutupan Lahan berdasarkan Luas Ruang Terbuka Hijau di wilayah Kabupaten diharapkan meningkat dengan melakukan pendataan jenis RTH sesuai dengan permenlhk

RENJA PERUBAHAN 2024

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah			Realisasi Capaian Tahun 2023	Proyeksi Tahun 2024	Catatan Analisis
				Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026			
1	2	3	4	5	6	7			12
5	Persentase pengelolaan sampah	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase pengelolaan sampah tercapai
6	Nilai SAKIP PD	-	-	75	76	77	-	75	Nilai SAKIP diharapkan meningkat
7	Nilai IKM	-	-	3,61	3,62	3,63	3,6	3,61	Nilai IKM DLH tercapai

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DLH

Untuk dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan baik, Dinas Lingkungan Hidup harus mengerti dan memahami permasalahan-permasalahan apa saja yang menjadi hambatan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup. Sebagaimana yang tertuang dalam dokumen RPD Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024-2026, bahwa permasalahan lingkungan yang menjadi isu di Kabupaten Bojonegoro saat ini adalah penurunan kualitas lingkungan hidup.

Ketika kualitas lingkungan hidup mengalami penurunan, produktivitas setor pertanian dan perkebunan yang sangat tergantung pada kualitas lingkungan hidup juga akan mengalami penurunan. Penurunan kualitas lingkungan hidup dipengaruhi banyak faktor, di antaranya adalah pertumbuhan penduduk, pembangunan infrastruktur, kebijakan industrialisasi, meningkatnya konversi lahan dan menurunnya daya dukung lingkungan. Berikut ini hasil identifikasi terhadap permasalahan/hambatan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup sebagai berikut:

A. Faktor internal

- 1) Terbatasnya tenaga laboratorium yang kompeten di bidangnya, dikarenakan UPT Laboratorium baru terbentuk;
- 2) Terbatasnya sarana prasarana untuk pemantauan pemeliharaan dan pengelolaan lingkungan;
- 3) Kurangnya SDM yang mempunyai kompetensi di bidang LH.

B. Faktor eksternal

- 1) Eksploitasi sumber daya alam masih terlalu mengedepankan profit dari sisi ekonomi;
- 2) Pemahaman dan kesadaran sebagian masyarakat akan pentingnya lingkungan hidup masih kurang, sehingga mempengaruhi kualitas lingkungan;
- 3) Kemampuan konservasi, rehabilitasi lahan dan air jauh dibawah tingkat kerusakannya;

- 4) Kepedulian masyarakat terhadap pengelolaan sampah belum maksimal; dan
- 5) Limbah domestik/industri yang langsung dibuang ke sungai, sehingga mencemari air sungai.

Setelah diketahui berbagai macam permasalahan/hambatan yang dihadapi oleh Dinas Lingkungan Hidup, maka dapat direkomendasikan formulasi isu untuk ditindak lanjuti dalam perumusan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup sebagai berikut:

- 1) Melakukan kerjasama dengan laboratorium lingkungan yang terakreditasi dan mengirim tenaga laboratorium untuk mengikuti pelatihan;
- 2) Peningkatan sarana prasarana pemantauan kualitas lingkungan;
- 3) Peningkatan sarana prasarana pengelolaan sampah;
- 4) Peningkatan edukasi dan pembinaan kepada masyarakat dalam hal perlindungan dan pelestarian fungsi lingkungan hidup;
- 5) Peningkatan upaya konservasi sumber daya air dan lahan melalui pembangunan sumur resapan dan penanaman pohon;
- 6) Peningkatan edukasi kepada masyarakat terkait pengelolaan sampah; dan
- 7) Peningkatan edukasi kepada masyarakat/home industri di bantaran sungai terkait pengelolaan limbah domestik dan pembangunan Ipal.

2.4. Review Terhadap RKPD

Review terhadap RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja, pencapaian target Renstra PD dan tingkat kinerja yang dicapai oleh PD, dengan arahan Kepala Daerah terkait prioritas program/kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk setiap PD berdasarkan RKPD.

Review terhadap RKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program/kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan untuk PD yang bersangkutan. Untuk lebih

jelasnya mengenai review Dinas Lingkungan Hidup terhadap RKPD sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2. 3. Review Terhadap RKPD Tahun 2024 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bojonegoro.

NO	RKPD					RKPD PERUBAHAN				
	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKTIF	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKTIF
P1	Program : Perencanaan Lingkungan Hidup	Kabupaten Bojonegoro	Presentase dokumen Kajian Lingkungan Hidup yang tersedia	100%	733,572,380	Program : Perencanaan Lingkungan Hidup	Kabupaten Bojonegoro	Presentase dokumen Kajian Lingkungan Hidup yang tersedia	100%	743,970,220
1	Kegiatan : Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Kabupaten Bojonegoro	Jumlah dokumen RPPLH yang disusun	3 Dokumen	504,469,780	Kegiatan : Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Kabupaten Bojonegoro	Jumlah dokumen RPPLH yang disusun	3 Dokumen	514,867,620
1.1	Sub Kegiatan : Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Kabupaten Bojonegoro	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	3 Dokumen	504,469,780	Sub Kegiatan : Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Kabupaten Bojonegoro	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	3 Dokumen	514,867,620
2	Kegiatan : Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Kabupaten Bojonegoro	Jumlah dokumen KLHS yang disusun	1 Dokumen	229,102,600	Kegiatan : Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Kabupaten Bojonegoro	Jumlah dokumen KLHS yang disusun	1 Dokumen	229,102,600

RENJA PERUBAHAN 2024

NO	RKPD					RKPD PERUBAHAN				
	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKTIF	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKTIF
2.1	Sub Kegiatan : Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Kabupaten Bojonegoro	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD	1 Dokumen	229,102,600	Sub Kegiatan : Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Kabupaten Bojonegoro	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD	1 Dokumen	229,102,600
P2	Program : Pengendalian Pencemaran dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Kabupaten Bojonegoro	1. Persentase titik pantau yang memenuhi baku mutu kualitas air dan udara	12%	1,574,022,916	Program : Pengendalian Pencemaran dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Kabupaten Bojonegoro	1. Persentase titik pantau yang memenuhi baku mutu kualitas air dan udara	12%	2,015,904,006
			2. Persentase luasan lahan yang direhabilitasi	1.53%	167,037,500			2. Persentase luasan lahan yang direhabilitasi	1.53%	267,037,500
1	Kegiatan : Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Kabupaten Bojonegoro	Jumlah Titik Observasi / Pengujian	25 Titik	1,552,316,616	Kegiatan : Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Kabupaten Bojonegoro	Jumlah Titik Observasi / Pengujian	25 Titik	1,994,197,706

RENJA PERUBAHAN 2024

NO	RKPD					RKPD PERUBAHAN				
	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKTIF	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKTIF
1.1	Sub Kegiatan : Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Kabupaten Bojonegoro	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	93 Dokumen	350,511,500	Sub Kegiatan : Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Kabupaten Bojonegoro	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	93 Dokumen	354,277,500
1.2	Sub Kegiatan : Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Kabupaten Bojonegoro	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1 Dokumen	396,369,500	Sub Kegiatan : Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Kabupaten Bojonegoro	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1 Dokumen	392,603,500
1.3	Sub Kegiatan : Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Kabupaten Bojonegoro	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	12 Dokumen	805,435,616	Sub Kegiatan : Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Kabupaten Bojonegoro	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	12 Dokumen	1,247,316,706

RENJA PERUBAHAN 2024

NO	RKPD					RKPD PERUBAHAN				
	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKTIF	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKTIF
2	Kegiatan : Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Kabupaten Bojonegoro	Jumlah kegiatan usaha yang melakukan penanggulangan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan yang memenuhi standard	30 Kegiatan/ Usaha	21,706,300	Kegiatan : Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Kabupaten Bojonegoro	Jumlah kegiatan usaha yang melakukan penanggulangan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan yang memenuhi standard	30 Kegiatan/ Usaha	21,706,300
2.1	Sub Kegiatan : Pemberian informasi peringatan pencemaran dan atau kerusakan Lingkungan Hidup pada masyarakat	Kabupaten Bojonegoro	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	2 Laporan	21,706,300	Sub Kegiatan : Pemberian informasi peringatan pencemaran dan atau kerusakan Lingkungan Hidup pada masyarakat	Kabupaten Bojonegoro	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	2 Laporan	21,706,300
3	Kegiatan : Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Kabupaten Bojonegoro	jumlah luasan lokasi sumber air dan lahan kritis yang tertangani	0.64 Ha	167,037,500	Kegiatan : Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Kabupaten Bojonegoro	jumlah luasan lokasi sumber air dan lahan kritis yang tertangani	0.64 Ha	267,037,500

RENJA PERUBAHAN 2024

NO	RKPD					RKPD PERUBAHAN				
	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKTIF	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKTIF
3.1	Sub Kegiatan : Koordinasi, dan Sinkronisasi Rehabilitasi	Kabupaten Bojonegoro	Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan	1 Kegiatan	167,037,500	Sub Kegiatan : Koordinasi, dan Sinkronisasi Rehabilitasi	Kabupaten Bojonegoro	Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan	1 Kegiatan	267,037,500
P3	Program : Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Kabupaten Bojonegoro	Presentase luasan RTH yang Berfungsi baik	100%	12,801,650,000	Program : Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Kabupaten Bojonegoro	Presentase luasan RTH yang Berfungsi baik	100%	14,316,071,544
1	Kegiatan : Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Kabupaten Bojonegoro	luasan RTH yang berfungsi baik	142.66 Ha	12,801,650,000	Kegiatan : Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Kabupaten Bojonegoro	luasan RTH yang berfungsi baik	142.66 Ha	14,316,071,544
1.1	Sub Kegiatan : Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	Kabupaten Bojonegoro	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan	142.66 Ha	12,801,650,000	Sub Kegiatan : Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	Kabupaten Bojonegoro	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan	142.66 Ha	14,316,071,544
P4	Program : Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Kabupaten Bojonegoro	Persentase persetujuan yang sudah memenuhi rincian teknis penyimpanan sementara limbah B3	100%	38,418,400	Program : Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Kabupaten Bojonegoro	Persentase persetujuan yang sudah memenuhi rincian teknis penyimpanan sementara limbah B3	100%	38,418,400

RENJA PERUBAHAN 2024

NO	RKPD					RKPD PERUBAHAN				
	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKTIF	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKTIF
1	Kegiatan : Penyimpanan Sementara Limbah B3	Kabupaten Bojonegoro	Jumlah persetujuan lingkungan yang memuat rincian teknis penyimpanan sementara limbah B3	10 Dokumen	38,418,400	Kegiatan : Penyimpanan Sementara Limbah B3	Kabupaten Bojonegoro	Jumlah persetujuan lingkungan yang memuat rincian teknis penyimpanan sementara limbah B3	10 Dokumen	38,418,400
1.1	Sub Kegiatan : Fasilitas pemenuhan komitmen izin penyimpanan sementara limbah B3 dilaksanakan melalui system pelayanan perizininan berusaha terintegrasi secara elektronik	Kabupaten Bojonegoro	Jumlah Fasilitas Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizininan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	10 Dokumen	20,249,200	Sub Kegiatan : Fasilitas pemenuhan komitmen izin penyimpanan sementara limbah B3 dilaksanakan melalui system pelayanan perizininan berusaha terintegrasi secara elektronik	Kabupaten Bojonegoro	Jumlah Fasilitas Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizininan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	10 Dokumen	20,249,200
1.2	Sub Kegiatan : Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Kabupaten Bojonegoro	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	10 laporan	18,169,200	Sub Kegiatan : Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Kabupaten Bojonegoro	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	10 laporan	18,169,200

RENJA PERUBAHAN 2024

NO	RKPD					RKPD PERUBAHAN				
	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKTIF	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKTIF
P5	Program : Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)	Kabupaten Bojonegoro	Persentase pembinaan dan pengawasan usaha dan/atau kegiatan yang terlaksana	100%	50,591,987	Program : Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)	Kabupaten Bojonegoro	Persentase pembinaan dan pengawasan usaha dan/atau kegiatan yang terlaksana	100%	50,591,987
1	Kegiatan : Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Bojonegoro	Jumlah dokumen pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungannya diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten	44 Dokumen	50,591,987	Kegiatan : Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Bojonegoro	Jumlah dokumen pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungannya diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten	44 Dokumen	50,591,987

RENJA PERUBAHAN 2024

NO	RKPD					RKPD PERUBAHAN				
	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKTIF	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKTIF
1.1	Sub Kegiatan : Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Kabupaten Bojonegoro	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	5 Dokumen	21,691,187	Sub Kegiatan : Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Kabupaten Bojonegoro	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	5 Dokumen	21,691,187
1.2	Sub Kegiatan : Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Kabupaten Bojonegoro	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	44 Badan Usaha	28,900,800	Sub Kegiatan : Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Kabupaten Bojonegoro	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	44 Badan Usaha	28,900,800

RENJA PERUBAHAN 2024

NO	RKPD					RKPD PERUBAHAN				
	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKTIF	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKTIF
P6	Program : Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Kabupaten Bojonegoro	Presentase kelompok masyarakat yang telah memiliki rencana aksi yang aktif melakukan gerakan peduli lingkungan hidup	68%	593,810,782	Program : Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Kabupaten Bojonegoro	Presentase kelompok masyarakat yang telah memiliki rencana aksi yang aktif melakukan gerakan peduli lingkungan hidup	68%	1,113,275,692
1	Kegiatan : Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Bojonegoro	Jumlah kelompok masyarakat yang telah memiliki rencana aksi yang mendapatkan pendampingan gerakan peduli lingkungan hidup	17 Lembaga	593,810,782	Kegiatan : Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Bojonegoro	Jumlah kelompok masyarakat yang telah memiliki rencana aksi yang mendapatkan pendampingan gerakan peduli lingkungan hidup	17 Lembaga	1,113,275,692
1.1	Sub Kegiatan : Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Kabupaten Bojonegoro	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	25 Dokumen	593,810,782	Sub Kegiatan : Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Kabupaten Bojonegoro	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	25 Dokumen	1,113,275,692

RENJA PERUBAHAN 2024

NO	RKPD					RKPD PERUBAHAN				
	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKTIF	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKTIF
P7	Program : Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Kabupaten Bojonegoro	Persentase Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menerima penghargaan	70%	87,165,700	Program : Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Kabupaten Bojonegoro	Persentase Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menerima penghargaan	70%	84,261,700
1	Kegiatan : Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Bojonegoro	Jumlah Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang diberikan	28 Entitas	87,165,700	Kegiatan : Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Bojonegoro	Jumlah Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang diberikan	28 Entitas	84,261,700
1.1	Sub Kegiatan : Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Kabupaten Bojonegoro	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantroph i yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	40 Entitas	87,165,700	Sub Kegiatan : Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Kabupaten Bojonegoro	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantroph i yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	40 Entitas	84,261,700

RENJA PERUBAHAN 2024

NO	RKPD					RKPD PERUBAHAN				
	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKTIF	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKTIF
P8	Program : Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Kabupaten Bojonegoro	Persentase Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang tertangani	100%	22,940,900	Program : Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Kabupaten Bojonegoro	Persentase Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang tertangani	100%	22,940,900
1	Kegiatan : Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Kabupaten Bojonegoro	Jumlah Pengaduan lingkungan yang terselesaikan	16 Pengaduan	22,940,900	Kegiatan : Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Kabupaten Bojonegoro	Jumlah Pengaduan lingkungan yang terselesaikan	16 Pengaduan	22,940,900
1.1	Sub Kegiatan : Pengelolaan Pengaduan permasalahan pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	Kabupaten Bojonegoro	Jumlah pengaduan permasalahan pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani	16 Pengaduan	3,557,700	Sub Kegiatan : Pengelolaan Pengaduan permasalahan pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	Kabupaten Bojonegoro	Jumlah pengaduan permasalahan pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani	16 Pengaduan	3,557,700

NO	RKPD					RKPD PERUBAHAN				
	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKTIF	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKTIF
1.2	Sub Kegiatan : Penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	Kabupaten Bojonegoro	Jumlah sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	16 Perkara	19,383,200	Sub Kegiatan : Penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	Kabupaten Bojonegoro	Jumlah sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	16 Perkara	19,383,200
P9	Program : Pengelolaan Persampahan	Kabupaten Bojonegoro	Presentase Volume Sampah yang terkelola	100%	10,130,590,912	Program : Pengelolaan Persampahan	Kabupaten Bojonegoro	Presentase Volume Sampah yang terkelola	100%	8,375,041,968
1	Kegiatan : Pengelolaan Sampah	Kabupaten Bojonegoro	Volume sampah yang terkelola per tahun	22902.23 Ton	10,130,590,912	Kegiatan : Pengelolaan Sampah	Kabupaten Bojonegoro	Volume sampah yang terkelola per tahun	22902.23 Ton	8,375,041,968
1.1	Sub Kegiatan : Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Kabupaten Bojonegoro	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	176 Kelompok	194,989,200	Sub Kegiatan : Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Kabupaten Bojonegoro	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	176 Kelompok	194,989,200

NO	RKPD					RKPD PERUBAHAN				
	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKTIF	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKTIF
1.2	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Kabupaten Bojonegoro	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada	2 Dokumen	41,022,000	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Kabupaten Bojonegoro	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada	2 Dokumen	41,022,000

RENJA PERUBAHAN 2024

NO	RKPD					RKPD PERUBAHAN				
	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKTIF	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKTIF
1.3	Sub Kegiatan : Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Kabupaten Bojonegoro	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	200 Unit	4,578,523,712	Sub Kegiatan : Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Kabupaten Bojonegoro	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	200 Unit	2,166,806,800
1.4	Sub Kegiatan : Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota	Kabupaten Bojonegoro	Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan	1 Dokumen	115,000,000	Sub Kegiatan : Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota	Kabupaten Bojonegoro	Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan	1 Dokumen	115,000,000
1.5	Sub Kegiatan : Penanganan sampah melalui pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan sampah	Kabupaten Bojonegoro	Jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik	64 Unit	4,625,765,000	Sub Kegiatan : Penanganan sampah melalui pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan sampah	Kabupaten Bojonegoro	Jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik	64 Unit	5,106,417,000

RENJA PERUBAHAN 2024

NO	RKPD					RKPD PERUBAHAN				
	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKTIF	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKTIF
1.6	Sub Kegiatan : Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah	Kabupaten Bojonegoro	Jumlah sampah yang terdaur ulang	951.66 Ton	84,351,000	Sub Kegiatan : Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah	Kabupaten Bojonegoro	Jumlah sampah yang terdaur ulang	951.66 Ton	41,465,000
1.7	Sub Kegiatan : Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	Kabupaten Bojonegoro	Jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	21950.57 Ton	490,940,000	Sub Kegiatan : Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	Kabupaten Bojonegoro	Jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	21950.57 Ton	709,341,968
P10	Program : Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Kabupaten Bojonegoro	Rata-rata capaian kegiatan penunjang urusan pemerintah daerah	100%	21,768,270,413	Program : Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Kabupaten Bojonegoro	Rata-rata capaian kegiatan penunjang urusan pemerintah daerah	100%	18,329,480,852
1	Kegiatan : Kegiatan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kabupaten Bojonegoro	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	13 Dokumen	38,220,402	Kegiatan : Kegiatan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kabupaten Bojonegoro	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	13 Dokumen	38,220,402

RENJA PERUBAHAN 2024

NO	RKPD					RKPD PERUBAHAN				
	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKTIF	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKTIF
1.1	Sub Kegiatan : penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Kabupaten Bojonegoro	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	14,450,300	Sub Kegiatan : penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Kabupaten Bojonegoro	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	14,450,300
1.2	Sub Kegiatan : koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	Kabupaten Bojonegoro	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	4,647,000	Sub Kegiatan : koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	Kabupaten Bojonegoro	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	4,647,000
1.3	Sub Kegiatan : Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	Kabupaten Bojonegoro	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	4,173,102	Sub Kegiatan : Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	Kabupaten Bojonegoro	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	4,173,102
1.4	Sub Kegiatan : koordinasi dan penyusunan dokumen DPA-SKPD	Kabupaten Bojonegoro	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1,934,000	Sub Kegiatan : koordinasi dan penyusunan dokumen DPA-SKPD	Kabupaten Bojonegoro	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1,934,000

RENJA PERUBAHAN 2024

NO	RKPD					RKPD PERUBAHAN				
	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKTIF	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKTIF
1.5	Sub Kegiatan : koordinasi dan penyusunan perubahan DPA-SKPD	Kabupaten Bojonegoro	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1,934,000	Sub Kegiatan : koordinasi dan penyusunan perubahan DPA-SKPD	Kabupaten Bojonegoro	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1,934,000
1.6	Sub Kegiatan : koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Kabupaten Bojonegoro	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dokumen	4,486,000	Sub Kegiatan : koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Kabupaten Bojonegoro	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dokumen	4,486,000
1.7	Sub Kegiatan : evaluasi kinerja perangkat daerah	Kabupaten Bojonegoro	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	6,596,000	Sub Kegiatan : evaluasi kinerja perangkat daerah	Kabupaten Bojonegoro	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	6,596,000
2	Kegiatan : Kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah	Kabupaten Bojonegoro	Jumlah laporan keuangan yang disusun	1 Laporan	19,374,865,451	Kegiatan : Kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah	Kabupaten Bojonegoro	Jumlah laporan keuangan yang disusun	1 Laporan	15,916,915,890
2.1	Sub Kegiatan : penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Kabupaten Bojonegoro	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	132 Orang/Bulan	18,988,519,151	Sub Kegiatan : penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Kabupaten Bojonegoro	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	128 Orang/Bulan	15,523,459,590

RENJA PERUBAHAN 2024

NO	RKPD					RKPD PERUBAHAN				
	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKTIF	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKTIF
2.2	Sub Kegiatan : penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Kabupaten Bojonegoro	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	371,216,200	Sub Kegiatan : penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Kabupaten Bojonegoro	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	371,216,200
2.3	Sub Kegiatan : koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran / SKPD	Kabupaten Bojonegoro	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD	12 Laporan	15,130,100	Sub Kegiatan : koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran / SKPD	Kabupaten Bojonegoro	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD	12 Laporan	22,240,100
3	Kegiatan : Administrasi kepegawaian perangkat daerah	Kabupaten Bojonegoro	Jumlah layanan administrasi kepegawaian yang tercukupi	1 Layanan	774,877,700	Kegiatan : Administrasi kepegawaian perangkat daerah	Kabupaten Bojonegoro	Jumlah layanan administrasi kepegawaian yang tercukupi	1 Layanan	801,147,700
3.1	Sub Kegiatan : Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kabupaten Bojonegoro	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	774,877,700	Sub Kegiatan : Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kabupaten Bojonegoro	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	801,147,700

RENJA PERUBAHAN 2024

NO	RKPD					RKPD PERUBAHAN				
	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKTIF	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKTIF
4	Kegiatan : Administrasi umum perangkat daerah	Kabupaten Bojonegoro	Jumlah layanan administrasi umum yang tercukupi	7 Layanan	437,062,682	Kegiatan : Administrasi umum perangkat daerah	Kabupaten Bojonegoro	Jumlah layanan administrasi umum yang tercukupi	7 Layanan	448,143,930
4.1	Sub Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kabupaten Bojonegoro	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	7,178,000	Sub Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kabupaten Bojonegoro	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	7,178,000
4.2	Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kabupaten Bojonegoro	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	118,832,882	Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kabupaten Bojonegoro	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	126,267,830
4.3	Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kabupaten Bojonegoro	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	96,294,100	Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kabupaten Bojonegoro	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	101,060,500
4.4	Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kabupaten Bojonegoro	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	76,513,100	Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kabupaten Bojonegoro	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	78,198,400
4.5	Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kabupaten Bojonegoro	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket	17,655,600	Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kabupaten Bojonegoro	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket	15,589,200

RENJA PERUBAHAN 2024

NO	RKPD					RKPD PERUBAHAN				
	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKTIF	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKTIF
4.6	Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kabupaten Bojonegoro	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	4,320,000	Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kabupaten Bojonegoro	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	3,600,000
4.7	Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten Bojonegoro	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	55 Laporan	116,269,000	Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten Bojonegoro	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	55 Laporan	116,250,000
5	Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kabupaten Bojonegoro	Jumlah jenis jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan	3 Jenis	465,598,678	Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kabupaten Bojonegoro	Jumlah jenis jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan	3 Jenis	454,517,430
5.1	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kabupaten Bojonegoro	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	235,654,230	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kabupaten Bojonegoro	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	235,654,230

RENJA PERUBAHAN 2024

NO	RKPD					RKPD PERUBAHAN				
	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKTIF	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKTIF
5.2	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kabupaten Bojonegoro	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	229,944,448	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kabupaten Bojonegoro	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	218,863,200
6	Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kabupaten Bojonegoro	Jumlah jenis pemeliharaan BMD penunjang urusan pemerintahan daerah	4 Jenis	677,645,500	Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kabupaten Bojonegoro	Jumlah jenis pemeliharaan BMD penunjang urusan pemerintahan daerah	4 Jenis	670,535,500
6.1	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kabupaten Bojonegoro	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	29 Unit	480,848,300	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kabupaten Bojonegoro	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	29 Unit	473,738,300
6.2	Sub Kegiatan : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kabupaten Bojonegoro	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	35 Unit	56,430,000	Sub Kegiatan : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kabupaten Bojonegoro	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	35 Unit	56,430,000

NO	RKPD					RKPD PERUBAHAN				
	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKTIF	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKTIF
6.3	Sub Kegiatan : Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kabupaten Bojonegoro	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	140,367,200	Sub Kegiatan : Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kabupaten Bojonegoro	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	140,367,200
JUMLAH					47,968,071,890	JUMLAH				45,356,994,769

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam penyusunan program/kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bojonegoro mengacu kepada usulan dari para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan PD, LSM, dan hasil pengumpulan informasi PD serta hasil pelaksanaan musrenbang kabupaten.

Usulan program/kegiatan untuk Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bojonegoro tahun 2024 yang berasal dari masyarakat dan para pemangku kepentingan diusulkan melalui Musrenbang Kecamatan, ditapis melalui tahapan forum PD dan Musrenbang Kabupaten. Dari Musrenbang tingkat Kabupaten kemudian diperoleh laporan hasil musrenbang Kabupaten untuk kemudian disusun menjadi Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2024, dan selanjutnya tersusunlah Rencana Kerja (Renja) PD tahun 2024.

Adapun hasil penelaahan terhadap usulan program dan kegiatan dari masyarakat dan para pemangku kepentingan, setelah dilakukan penapisan dan verifikasi awal terhadap usulan yang memenuhi kriteria, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2. 4. Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Tahun 2024.

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kegiatan	Besaran/Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
			NIHIL		

BAB III

TUJUAN SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bojonegoro melaksanakan kebijakan daerah yang sinergis dengan kebijakan nasional maupun provinsi. Agar dapat melaksanakan fungsi- fungsi tersebut maka kegiatan yang akan dilakukan diharapkan tidak bertentangan dengan kepentingan umum peraturan di atasnya mempunyai rasa keadilan pemerataan dan diarahkan implementasinya akan dapat berdampak pada kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bojonegoro.

Arah kebijakan pembangunan nasional di antaranya adalah meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam berkelanjutan di mana harus ada keseimbangan antara pemanfaatan dan kelestarian sumber daya alam atau yang lebih dikenal dengan konsep ekonomi hijau. Ekonomi hijau bermakna perekonomian yang tidak merugikan lingkungan hidup. Ekonomi hijau juga dapat diartikan sebagai ekonomi yang mampu meningkatkan kesejahteraan dan keadilan sosial dan meminimalkan dampak negatif pertumbuhan ekonomi terhadap lingkungan dan kelangkaan sumber daya alam.

Konsep ekonomi hijau melengkapi konsep pembangunan berkelanjutan sebagaimana diketahui prinsip utama dari pembangunan berkelanjutan adalah memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan generasi masa depan sehingga dapat dikatakan bahwa ekonomi hijau merupakan motor utama pembangunan berkelanjutan sebagaimana spirit utama RPJPD dan RPJMD Kabupaten Bojonegoro.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Lingkungan Hidup

Adapun tujuan dan sasaran Renja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bojonegoro tahun 2024 mengacu pada Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024-2026 yaitu *“Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup”*.

Untuk lebih jelasnya mengenai tujuan dan sasaran Renja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bojonegoro sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3. 1. Perumusan Tujuan dan Sasaran.

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA AWAL	TARGET KINERJA PERUBAHAN
1	2	3	4	5
Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	70,14	70,14
	Menurunnya Pencemaran Air dan Udara di Wilayah Bojonegoro	Presentase Kualitas Air di titik pantau kewenangan kabupaten (Kategori Minimal Sedang)	30%	30%
		Capain Kualitas Udara diwilayah Kabupaten yang meliputi Perkantoran, Transportasi, Perumahan dan Industri	87,2	87,2
	Meningkatnya Luasan Tutupan Lahan	Kualitas Tutupan Lahan berdasarkan Luas Ruang Terbuka Hijau di wilayah Kabupaten	58,59	58,59
	Cakupan pengelolaan sampah	Persentase penanganan sampah	100%	100%
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP PD	75	75
		Nilai IKM	3,61	3,61

3.3. Program dan Kegiatan

Tujuan dan sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bojonegoro yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Dinas Lingkungan Hidup tahun 2024-2026 dicapai dengan menggunakan kebijakan dan program. Arah

kebijakan akan mengarahkan pilihan-pilihan strategi yang akan menjadi fokus penanganan permasalahan yang hendak diselesaikan dalam setiap tahunnya selama 3 (tiga) tahun, sehingga memiliki kesinambungan untuk setiap periode dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan di Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bojonegoro.

Oleh karena itu setiap program dan kegiatan harus terkait dengan suatu sasaran dan kebijakan yang telah ditetapkan, program dan kegiatan tersebut harus konsisten dengan RPJMD. Dalam RPJMD telah ditetapkan program prioritas dan program penunjang serta arahan kegiatan pokok pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Ada 10 program dan 18 kegiatan dan 46 sub kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bojonegoro di Tahun 2024. Sedangkan program/kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup dalam mencapai tujuan dan sasaran Dinas Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut:

1) Program penunjang urusan pemerintahan kabupaten daerah kabupaten/kota

- 1.1 Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah
 - a. Penyusunan Dok Perenc Perangkat Daerah
 - b. Koordinasi dan Penyusunan Dok RKA SKPD
 - c. Koordinasi dan Penyusunan Dok Perub RKA SKPD
 - d. Koordinasi dan Penyusunan Dok DPA SKPD
 - e. Koordinasi dan Penyusunan Perub DPA SKPD
 - f. Koordinasi dan Penyusunan Lap Capaian Kinerja
 - g. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- 1.2 Administrasi keuangan perangkat daerah
 - a. Penyediaan Gaji dan Tunj ASN
 - b. Penyediaan Adm Pelaksanaan Tugas ASN
 - c. Koordinasi dan Penyusunan Lap Keuangan
- 1.3 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- a. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya

1.4 Administrasi umum perangkat daerah

- a. Penyediaan Komp Instalasi Listrik
- b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- d. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- e. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- f. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan.
- g. Penyelenggaraan Rakor dan Konsultasi

1.5 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- a. Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA dan Listrik
- b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

1.6 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan
- b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya
- c. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

2) Program Perencanaan Lingkungan Hidup

1.1 Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota

- a. Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota

1.2 Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota

- a. Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD

3) Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup

1.1 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota

- a. Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara Dan Laut
- b. Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi Dan Adaptasi Perubahan Iklim
- c. Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
- 1.2 Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
 - a. Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup Pada Masyarakat
- 1.3 Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
 - a. Koordinasi dan Sinkronisasi Rehabilitasi
- 4) Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)**
 - 1.1 Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota
 - a. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
- 5) Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)**
 - 1.1 Penyimpanan Sementara Limbah B3
 - a. Fasilitas Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
 - b. Verifikasi Lapangan Untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi Dan Teknis Pengumpulan Limbah B3
- 6) Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPIh)**
 - 1.1 Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan

- a. Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH
- b. Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

7) Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat

- 1.1 Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup

8) Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat

- 1.1 Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

9) Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup

- 1.1 Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
 - a. Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota
 - b. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota

10) Program Pengelolaan Persampahan

- 1.1 Pengelolaan Sampah
 - a. Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan
 - b. Koordinasi Dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana Dan Prasarana Pengelolaan Persampah

- c. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota
- d. Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota
- e. Penanganan sampah melalui pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan sampah
- f. Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah
- g. Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional

Tabel 3. 2. Rekapitulasi Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Tahun 2024 Perubahan.

No.	Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Jumlah	Lokasi	Pendanaan (Rp)
1	2	3	4	5
1	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup		Kab. Bojonegoro	Rp 45.356.994.769
	Jumlah Program	10		
	Jumlah Kegiatan	18		
	Jumlah Sub Kegiatan	46		

BAB IV

RENCANA PROGRAM DAN PENDANAAN

4.1. Program Dan Pendanaan

Ada beberapa Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang pagu maupun Outputnya tidak sesuai dengan Rancangan Awal Renja atau mengalami perubahan menyesuaikan dengan prioritas dan kebutuhan. Untuk itu lebih jelasnya mengenai rumusan program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup tahun 2024 pada RKPD dan RKPD Perubahan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4. 1. Pagu Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024.

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		TARGET KINERJA			SATUAN INDIKATOR	PAGU		
		SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD 2024	PENJABARAN APBD 2024	PERUBAHAN RKPD 2024		RKPD 2024	PENJABARAN APBD 2024	PERUBAHAN RKPD 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP								42.018.471.325	47.968.071.890	45.356.994.769
1		Program : Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Program : Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Rata-rata capaian kegiatan penunjang urusan pemerintah daerah	Rata-rata capaian kegiatan penunjang urusan pemerintah daerah	100	100	100	%	15.772.617.048	21.768.270.413	18.329.480.852
1.1		Kegiatan : Kegiatan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kegiatan : Kegiatan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	13	13	13	Dokumen	35.114.000	38.220.402	38.220.402
1.1.1		Sub Kegiatan : penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Sub Kegiatan : penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4	4	4	Dokumen	13.622.000	14.450.300	14.450.300

RENJA PERUBAHAN 2024

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		TARGET KINERJA			SATUAN INDIKATOR	PAGU		
		SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD 2024	PENJABARAN APBD 2024	PERUBAHAN RKPD 2024		RKPD 2024	PENJABARAN APBD 2024	PERUBAHAN RKPD 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1.2		Sub Kegiatan : koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	Sub Kegiatan : koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	1	1	Dokumen	4.124.000	4.647.000	4.647.000
1.1.3		Sub Kegiatan : Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	Sub Kegiatan : Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	1	1	Dokumen	4.124.000	4.173.102	4.173.102
1.1.4		Sub Kegiatan : koordinasi dan penyusunan dokumen DPA-SKPD	Sub Kegiatan : koordinasi dan penyusunan dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	1	1	Dokumen	1.955.000	1.934.000	1.934.000

RENJA PERUBAHAN 2024

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		TARGET KINERJA			SATUAN INDIKATOR	PAGU		
		SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD 2024	PENJABARAN APBD 2024	PERUBAHAN RKPD 2024		RKPD 2024	PENJABARAN APBD 2024	PERUBAHAN RKPD 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1.5		Sub Kegiatan : koordinasi dan penyusunan perubahan DPA-SKPD	Sub Kegiatan : koordinasi dan penyusunan perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	1	1	Dokumen	1.955.000	1.934.000	1.934.000
1.1.6		Sub Kegiatan : koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Sub Kegiatan : koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	1	1	Dokumen	3.074.000	4.486.000	4.486.000
1.1.7		Sub Kegiatan : evaluasi kinerja perangkat daerah	Sub Kegiatan : evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	4	4	Laporan	6.260.000	6.596.000	6.596.000
1.2		Kegiatan : Kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah	Kegiatan : Kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah	Jumlah laporan keuangan yang disusun	Jumlah laporan keuangan yang disusun	1	1	1	Laporan	14.638.059.368	19.374.865.451	15.916.915.890

RENJA PERUBAHAN 2024

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		TARGET KINERJA			SATUAN INDIKATOR	PAGU		
		SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD 2024	PENJABARAN APBD 2024	PERUBAHAN RKPD 2024		RKPD 2024	PENJABARAN APBD 2024	PERUBAHAN RKPD 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.2.1		Sub Kegiatan : penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Sub Kegiatan : penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	132	132	128	Orang/ Bulan	14.175.868.586	18.988.519.151	15.523.459.590
1.2.2		Sub Kegiatan : penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Sub Kegiatan : penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	12	12	Dokumen	447.066.782	371.216.200	371.216.200
1.2.3		Sub Kegiatan : koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran / SKPD	Sub Kegiatan : koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran / SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD	12	12	12	Laporan	15.124.000	15.130.100	22.240.100
1.3		Kegiatan : Administrasi kepegawaian perangkat daerah	Kegiatan : Administrasi kepegawaian perangkat daerah	Jumlah layanan administrasi kepegawaian yang tercukupi	Jumlah layanan administrasi kepegawaian yang tercukupi	1	1	1	Layanan	40.300.000	774.877.700	801.147.700

RENJA PERUBAHAN 2024

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		TARGET KINERJA			SATUAN INDIKATOR	PAGU		
		SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD 2024	PENJABARAN APBD 2024	PERUBAHAN RKPD 2024		RKPD 2024	PENJABARAN APBD 2024	PERUBAHAN RKPD 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.3.1		Sub Kegiatan : Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Sub Kegiatan : Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2	2	2	Paket	40.300.000	774.877.700	801.147.700
1.4		Kegiatan : Administrasi umum perangkat daerah	Kegiatan : Administrasi umum perangkat daerah	Jumlah layanan administrasi umum yang tercukupi	Jumlah layanan administrasi umum yang tercukupi	7	7	7	Layanan	452.020.400	437.062.682	448.143.930
1.4.1		Sub Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Sub Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5	5	5	Paket	7.145.000	7.178.000	7.178.000
1.4.2		Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4	4	4	Paket	166.803.400	118.832.882	126.267.830
1.4.3		Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2	2	2	Paket	71.707.000	96.294.100	101.060.500
1.4.4		Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2	2	2	Paket	47.710.000	76.513.100	78.198.400

RENJA PERUBAHAN 2024

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		TARGET KINERJA			SATUAN INDIKATOR	PAGU		
		SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD 2024	PENJABARAN APBD 2024	PERUBAHAN RKPD 2024		RKPD 2024	PENJABARAN APBD 2024	PERUBAHAN RKPD 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.4.5		Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	6	6	6	Paket	18.096.000	17.655.600	15.589.200
1.4.6		Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12	12	12	Dokumen	6.000.000	4.320.000	3.600.000
1.4.7		Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	55	55	55	Laporan	134.559.000	116.269.000	116.250.000
1.5		Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan	Jumlah jenis jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan	3	3	3	Jenis	379.437.280	465.598.678	454.517.430
1.5.1		Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12	12	Laporan	186.737.200	235.654.230	235.654.230

RENJA PERUBAHAN 2024

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		TARGET KINERJA			SATUAN INDIKATOR	PAGU		
		SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD 2024	PENJABARAN APBD 2024	PERUBAHAN RKPD 2024		RKPD 2024	PENJABARAN APBD 2024	PERUBAHAN RKPD 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.5.2		Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	12	12	Laporan	192.700.080	229.944.448	218.863.200
1.6		Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis pemeliharaan BMD penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah jenis pemeliharaan BMD penunjang urusan pemerintahan daerah	4	4	4	Jenis	227.686.000	677.645.500	670.535.500
1.6.1		Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	29	29	29	Unit	25.686.000	480.848.300	473.738.300
1.6.2		Sub Kegiatan : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Sub Kegiatan : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	35	35	35	Unit	27.000.000	56.430.000	56.430.000
1.6.3		Sub Kegiatan : Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Sub Kegiatan : Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1	1	1	Unit	175.000.000	140.367.200	140.367.200

RENJA PERUBAHAN 2024

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		TARGET KINERJA			SATUAN INDIKATOR	PAGU		
		SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD 2024	PENJABARAN APBD 2024	PERUBAHAN RKPD 2024		RKPD 2024	PENJABARAN APBD 2024	PERUBAHAN RKPD 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2		Program : Perencanaan Lingkungan Hidup	Program : Perencanaan Lingkungan Hidup	Presentase dokumen Kajian Lingkungan Hidup yang tersedia	Presentase dokumen Kajian Lingkungan Hidup yang tersedia	100	100	100	%	534.000.419	733.572.380	743.970.220
2.1		Kegiatan : Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Kegiatan : Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen RPPLH yang disusun	Jumlah dokumen RPPLH yang disusun	3	3	3	Dokumen	384.000.419	504.469.780	514.867.620
2.1.1		Sub Kegiatan : Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan : Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	3	3	3	Dokumen	384.000.419	504.469.780	514.867.620
2.2		Kegiatan : Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Kegiatan : Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen KLHS yang disusun	Jumlah dokumen KLHS yang disusun	1	1	1	Dokumen	150.000.000	229.102.600	229.102.600
2.2.1		Sub Kegiatan : Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Sub Kegiatan : Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD	1	1	1	Dokumen	150.000.000	229.102.600	229.102.600

RENJA PERUBAHAN 2024

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		TARGET KINERJA			SATUAN INDIKATOR	PAGU		
		SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD 2024	PENJABARAN APBD 2024	PERUBAHAN RKPD 2024		RKPD 2024	PENJABARAN APBD 2024	PERUBAHAN RKPD 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3		Program : Pengendalian Pencemaran dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Program : Pengendalian Pencemaran dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	1. Persentase titik pantau yang memenuhi baku mutu kualitas air dan udara	1. Persentase titik pantau yang memenuhi baku mutu kualitas air dan udara	12	12	12	%	1.282.543.618	1.574.022.916	2.015.904.006
				2. Persentase luasan lahan yang direhabilitasi	2. Persentase luasan lahan yang direhabilitasi	1,53	1,53	1,53	%	167.037.705	167.037.500	267.037.500
3.1		Kegiatan : Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Kegiatan : Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Titik Observasi / Pengujian	Jumlah Titik Observasi / Pengujian	25	25	25	Titik	1.260.837.318	1.552.316.616	1.994.197.706
3.1.1		Sub Kegiatan : Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Sub Kegiatan : Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	93	93	93	Dokumen	250.511.620	350.511.500	354.277.500

RENJA PERUBAHAN 2024

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		TARGET KINERJA			SATUAN INDIKATOR	PAGU		
		SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD 2024	PENJABARAN APBD 2024	PERUBAHAN RKPD 2024		RKPD 2024	PENJABARAN APBD 2024	PERUBAHAN RKPD 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3.1.2		Sub Kegiatan : Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Sub Kegiatan : Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1	1	1	Dokumen	196.369.988	396.369.500	392.603.500
3.1.3		Sub Kegiatan : Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan : Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	12	12	12	Dokumen	813.955.710	805.435.616	1.247.316.706
3.2		Kegiatan : Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Kegiatan : Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan usaha yang melakukan penanggulangan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan yang memenuhi standard	Jumlah kegiatan usaha yang melakukan penanggulangan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan yang memenuhi standard	30	30	30	kegiatan / usaha	21.706.300	21.706.300	21.706.300

RENJA PERUBAHAN 2024

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		TARGET KINERJA			SATUAN INDIKATOR	PAGU		
		SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD 2024	PENJABARAN APBD 2024	PERUBAHAN RKPD 2024		RKPD 2024	PENJABARAN APBD 2024	PERUBAHAN RKPD 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3.2.1		Sub Kegiatan : Pemberian informasi peringatan pencemaran dan atau kerusakan Lingkungan Hidup pada masyarakat	Sub Kegiatan : Pemberian informasi peringatan pencemaran dan atau kerusakan Lingkungan Hidup pada masyarakat	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	2	2	2	Laporan	21.706.300	21.706.300	21.706.300
3.3		Kegiatan : Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Kegiatan : Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	jumlah luasan lokasi sumber air dan lahan kritis yang tertangani	jumlah luasan lokasi sumber air dan lahan kritis yang tertangani	0,64	0,64	0,64	Ha	167.037.705	167.037.500	267.037.500
3.3.1		Sub Kegiatan : Koordinasi, dan Sinkronisasi Rehabilitasi	Sub Kegiatan : Koordinasi, dan Sinkronisasi Rehabilitasi	Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan	Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan	1	1	1	Kegiatan	167.037.705	167.037.500	267.037.500
4		Program : Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Program : Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Presentase luasan RTH yang Berfungsi baik	Presentase luasan RTH yang Berfungsi baik	100	100	100	%	12.904.550.000	12.801.650.000	14.316.071.544

RENJA PERUBAHAN 2024

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		TARGET KINERJA			SATUAN INDIKATOR	PAGU		
		SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD 2024	PENJABARAN APBD 2024	PERUBAHAN RKPD 2024		RKPD 2024	PENJABARAN APBD 2024	PERUBAHAN RKPD 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4.1		Kegiatan : Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Kegiatan : Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	luasan RTH yang berfungsi baik	luasan RTH yang berfungsi baik	142,66	142,66	142,66	Ha	12.904.550.000	12.801.650.000	14.316.071.544
4.1.1		Sub Kegiatan : Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	Sub Kegiatan : Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan	142,66	142,66	142,66	Ha	12.904.550.000	12.801.650.000	14.316.071.544
5		Program : Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Program : Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Persentase persetujuan yang sudah memenuhi rincian teknis penyimpanan sementara limbah B3	Persentase persetujuan yang sudah memenuhi rincian teknis penyimpanan sementara limbah B3	100	100	100	%	38.428.400	38.418.400	38.418.400
5.1		Kegiatan : Penyimpanan Sementara Limbah B3	Kegiatan : Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah persetujuan lingkungan yang memuat rincian teknis penyimpanan sementara limbah B3	Jumlah persetujuan lingkungan yang memuat rincian teknis penyimpanan sementara limbah B3	10	10	10	Dokumen	38.428.400	38.418.400	38.418.400

RENJA PERUBAHAN 2024

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		TARGET KINERJA			SATUAN INDIKATOR	PAGU		
		SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD 2024	PENJABARAN APBD 2024	PERUBAHAN RKPD 2024		RKPD 2024	PENJABARAN APBD 2024	PERUBAHAN RKPD 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5.1.1		Sub Kegiatan : Fasilitas pemenuhan komitmen izin penyimpanan sementara limbah B3 dilaksanakan melalui system pelayanan perizininan berusaha terintegrasi secara elektronik	Sub Kegiatan : Fasilitas pemenuhan komitmen izin penyimpanan sementara limbah B3 dilaksanakan melalui system pelayanan perizininan berusaha terintegrasi secara elektronik	Jumlah Fasilitas Persetujuan/ Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Fasilitas Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	10	10	10	Dokumen	1.428.400	20.249.200	20.249.200
5.1.2		Sub Kegiatan : Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Sub Kegiatan : Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	10	10	10	Laporan	37.000.000	18.169.200	18.169.200

RENJA PERUBAHAN 2024

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		TARGET KINERJA			SATUAN INDIKATOR	PAGU		
		SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD 2024	PENJABARAN APBD 2024	PERUBAHAN RKPD 2024		RKPD 2024	PENJABARAN APBD 2024	PERUBAHAN RKPD 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6		Program : Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)	Program : Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)	Persentase pembinaan dan pengawasan usaha dan/atau kegiatan yang terlaksana	Persentase pembinaan dan pengawasan usaha dan/atau kegiatan yang terlaksana	100	100	100	%	216.568.432	50.591.987	50.591.987
6.1		Kegiatan : Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kegiatan : Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungannya diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten	Jumlah dokumen pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungannya diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten	44	44	44	Dokumen	216.568.432	50.591.987	50.591.987

RENJA PERUBAHAN 2024

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		TARGET KINERJA			SATUAN INDIKATOR	PAGU		
		SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD 2024	PENJABARAN APBD 2024	PERUBAHAN RKPD 2024		RKPD 2024	PENJABARAN APBD 2024	PERUBAHAN RKPD 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6.1.1		Sub Kegiatan : Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Sub Kegiatan : Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	5	5	5	Dokumen	25.000.000	21.691.187	21.691.187
6.1.2		Sub Kegiatan : Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Sub Kegiatan : Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	44	44	44	Badan Usaha	191.568.432	28.900.800	28.900.800

RENJA PERUBAHAN 2024

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		TARGET KINERJA			SATUAN INDIKATOR	PAGU		
		SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD 2024	PENJABARAN APBD 2024	PERUBAHAN RKPD 2024		RKPD 2024	PENJABARAN APBD 2024	PERUBAHAN RKPD 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7		Program : Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Program : Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Presentase kelompok masyarakat yang telah memiliki rencana aksi yang aktif melakukan gerakan peduli lingkungan hidup	Presentase kelompok masyarakat yang telah memiliki rencana aksi yang aktif melakukan gerakan peduli lingkungan hidup	68	68	68	%	339.385.500	593.810.782	1.113.275.592
7.1		Kegiatan : Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kegiatan : Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kelompok masyarakat yang telah memiliki rencana aksi yang mendapatkan pendampingan gerakan peduli lingkungan hidup	Jumlah kelompok masyarakat yang telah memiliki rencana aksi yang mendapatkan pendampingan gerakan peduli lingkungan hidup	17	17	17	Lembaga	339.385.500	593.810.782	1.113.275.592
7.1.1		Sub Kegiatan : Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Sub Kegiatan : Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	25	25	25	Dokumen	339.385.500	593.810.782	1.113.275.592

RENJA PERUBAHAN 2024

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		TARGET KINERJA			SATUAN INDIKATOR	PAGU		
		SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD 2024	PENJABARAN APBD 2024	PERUBAHAN RKPD 2024		RKPD 2024	PENJABARAN APBD 2024	PERUBAHAN RKPD 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8		Program : Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Program : Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menerima penghargaan	Persentase Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menerima penghargaan	70	70	70	%	146.540.075	87.165.700	84.261.700
8.1		Kegiatan : Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kegiatan : Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang diberikan	Jumlah Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang diberikan	28	28	28	Entitas	146.540.075	87.165.700	84.261.700
8.1.1		Sub Kegiatan : Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Sub Kegiatan : Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	40	40	40	Entitas	146.540.075	87.165.700	84.261.700

RENJA PERUBAHAN 2024

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		TARGET KINERJA			SATUAN INDIKATOR	PAGU		
		SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD 2024	PENJABARAN APBD 2024	PERUBAHAN RKPD 2024		RKPD 2024	PENJABARAN APBD 2024	PERUBAHAN RKPD 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9		Program : Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Program : Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang tertangani	Persentase Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang tertangani	100	100	100	%	56.536.416	22.940.900	22.940.900
9.1		Kegiatan : Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Kegiatan : Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah Pengaduan lingkungan yang terselesaikan	Jumlah Pengaduan lingkungan yang terselesaikan	16	16	16	Pengaduan	56.536.416	22.940.900	22.940.900
9.1.1		Sub Kegiatan : Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan : Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani	16	16	16	Pengaduan	36.901.616	3.557.700	3.557.700

RENJA PERUBAHAN 2024

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		TARGET KINERJA			SATUAN INDIKATOR	PAGU		
		SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD 2024	PENJABARAN APBD 2024	PERUBAHAN RKPD 2024		RKPD 2024	PENJABARAN APBD 2024	PERUBAHAN RKPD 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9.1.2		Sub Kegiatan : Penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	Sub Kegiatan : Penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	Jumlah sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	Jumlah sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	16	16	16	Perkara	19.634.800	19.383.200	19.383.200
10		Program : Pengelolaan Persampahan	Program : Pengelolaan Persampahan	Presentase Volume Sampah yang terkelola	Presentase Volume Sampah yang terkelola	100	100	100	%	10.560.263.712	10.130.590.912	8.375.041.968
10.1		Kegiatan : Pengelolaan Sampah	Kegiatan : Pengelolaan Sampah	Volume sampah yang terkelola per tahun	Volume sampah yang terkelola per tahun	22902.23	22902.23	22902.23	Ton	10.560.263.712	10.130.590.912	8.375.041.968
10.1.1		Sub Kegiatan : Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Sub Kegiatan : Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	176	176	176	Kelompok	115.000.000	194.989.200	194.989.200

RENJA PERUBAHAN 2024

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		TARGET KINERJA			SATUAN INDIKATOR	PAGU		
		SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD 2024	PENJABARAN APBD 2024	PERUBAHAN RKPD 2024		RKPD 2024	PENJABARAN APBD 2024	PERUBAHAN RKPD 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10.1.2		Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada	2	2	2	Dokumen	92.200.000	41.022.000	41.022.000

RENJA PERUBAHAN 2024

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		TARGET KINERJA			SATUAN INDIKATOR	PAGU		
		SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD 2024	PENJABARAN APBD 2024	PERUBAHAN RKPD 2024		RKPD 2024	PENJABARAN APBD 2024	PERUBAHAN RKPD 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10.1.3		Sub Kegiatan : Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan : Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	200	200	200	Unit	5.054.820.000	4.578.523.712	2.166.806.800
10.1.4		Sub Kegiatan : Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota	Sub Kegiatan : Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota	Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan	Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan	1	1	1	Dokumen	490.940.000	115.000.000	115.000.000
10.1.5		Sub Kegiatan : Penanganan sampah melalui pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan sampah	Sub Kegiatan : Penanganan sampah melalui pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan sampah	Jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik	Jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik	64	64	64	Unit	193.780.000	4.625.765.000	5.106.417.000

RENJA PERUBAHAN

2024

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		TARGET KINERJA			SATUAN INDIKATOR	PAGU		
		SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD 2024	PENJABARAN APBD 2024	PERUBAHAN RKPD 2024		RKPD 2024	PENJABARAN APBD 2024	PERUBAHAN RKPD 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10.1.6		Sub Kegiatan : Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah	Sub Kegiatan : Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah	Jumlah sampah yang terdaur ulang	Jumlah sampah yang terdaur ulang	951,66	951,66	951,66	Ton	35.000.000	84.351.000	41.465.000
10.1.7		Sub Kegiatan : Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	Sub Kegiatan : Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	Jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	Jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	21950.57	21950.57	21950.57	Ton	4.578.523.712	490.940.000	709.341.968
JUMLAH										42.018.471.325	47.968.071.890	45.356.994.769

BAB V

PENUTUP

Rencana kerja Perubahan (Renja Perubahan) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bojonegoro merupakan dokumen rencana kerja yang berfungsi sebagai pedoman kerja bagi Aparatur Dinas Lingkungan Hidup dalam melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bojonegoro tahun 2024.

Renja Perubahan sangat penting artinya dalam mengaplikasikan persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengakomodir berbagai kebutuhan masyarakat. Perencanaan pembangunan berbasis masyarakat dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (*stakeholders*) dalam menciptakan *Good Governance* sesuai dengan tuntutan paradigma baru mampu menciptakan kebijakan yang berdampak langsung pada masyarakat kecil.

Oleh sebab itu Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bojonegoro dalam merumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2024 memprioritaskan pada penyelesaian isu-isu strategis dalam menjawab berbagai persoalan lingkungan hidup sebagaimana rencana tindaklanjut yang dituangkan dalam Renja Perubahan Dinas Lingkungan Hidup tahun 2024.

Renja Perubahan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bojonegoro selain menjadi pedoman pelaksanaan dan sarana peningkatan kinerja serta bahan pelaksanaan kegiatan tahun 2024. Renja Perubahan juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana kerja berikutnya, sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik.

Bojonegoro, 23 September 2024

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN BOJONEGORO



DANDI SUPRAYITNO, AP, M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19730715 199311 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jl. Dr Wahidin No. 40 Telp. (0353) 881826 Pswt. 140

BOJONEGORO

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN BOJONEGORO
NOMOR : 188/ 368 /KEP/412.217/2024**

TENTANG

**TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PERUBAHAN (RENJA-P)
TAHUN 2024
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BOJONEGORO
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BOJONEGORO**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 125 huruf (a) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah serta Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru maka perlu membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Perubahan (Renja-P) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bojonegoro.
- b. bahwa dalam rangka Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bojonegoro dipandang perlu membentuk Tim Penyusun Renja Perubahan (Renja-P) Dinas Lingkungan Hidup

Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024.

- c. bahwa berdasarkan huruf a dan b tersebut di atas, dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bojonegoro.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara republic Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaga Negara Tahun 2011) Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembar Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bojonegoro Tahun 2018-2023;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro;
13. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 87 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bojonegoro.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bojonegoro tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Perubahan

(Renja-P) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024.

- KESATU : Tim Penyusun Rencana Kerja Perubahan (Renja-P) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusun Rencana Kerja Perubahan (Renja-P) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- Menyusun Rancangan Awal Renja-P Tahun 2024;
 - Menyempurnakan Rancangan Renja-P Tahun 2024 berdasarkan Surat Edaran Bupati Bojonegoro tentang Penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah;
 - Menyelenggarakan Forum Perangkat Daerah;
 - Menyusun Rancangan Renja-P Tahun 2024;
 - Menyusun Rancangan Akhir Renja-P Tahun 2024 untuk ditetapkan melalui Peraturan Bupati Bojonegoro;
 - Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bojonegoro.
- KETIGA : Segala biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada anggaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bojonegoro.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bojonegoro

Pada tanggal : 01 Juli 2024

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN BOJONEGORO



DANDI SUPRAYITNO, AP, M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19730715 199311 1 002

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
NOMOR : 188/ 368 /KEP/412.217/2024
Tanggal : 01 Juli 2024

**TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PERUBAHAN (RENJA-P)
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BOJONEGORO
TAHUN 2024**

No.	Kedudukan dalam Tim	Jabatan dalam Kedinasan
1.	Pengarah	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bojonegoro
2.	Ketua	Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bojonegoro
3.	Sekretaris	Analisis Kebijakan Ahli Muda
4.	Anggota	Kepala Bidang Tata Lingkungan
		Kepala Bidang Pengendalian Lingkungan
		Kepala Bidang Persampahan dan RTH

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN BOJONEGORO



DANDI SUPRAYITNO, AP, M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19730715 199311 1 002